



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A

**TRIWULAN I
2023**

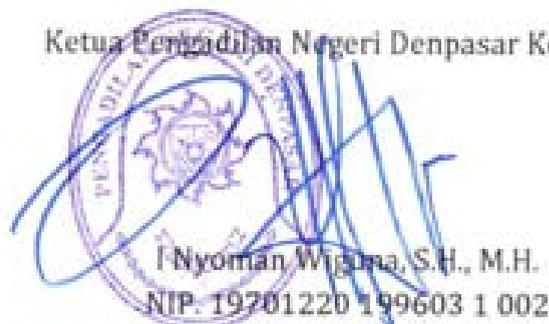
LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN SURVEI
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI
PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A**

**Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah**

Disahkan di Denpasar
Pada hari : Senin 10 April 2023

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A,



Nyoman Wiguna, S.H., M.H.
NIP. 19701220 199603 1 002

Ketua Tim Survei,



A.A. Gde Suadika Putra, SH
NIP.19711222 199203 1003

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Maksud Dan Tujuan	4
1.3. Landasan Hukum	5
1.4. Rencana Kerja.....	5
BAB II	7
METODOLOGI	7
2.1. Metode Penelitian.....	7
2.2. Populasi Dan Sampel	7
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	7
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	7
2.5. Teknik Analisis Data	8
2.6. Tahapan pelaksanaan	8
BAB III	10
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	10
3.1. Profil responden	10
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator.....	13
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	23
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	24
BAB IV	25
PENUTUP	25
4.1. Kesimpulan.....	25
4.2. Rekomendasi.....	25
Lampiran.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi

pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana
Survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- a. Jumlah Responden.
- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu setiap bulan, triwulan, dan semester. Pada laporan ini, survei dilaksanakan pada Triwulan I yakni pada bulan Januari-Maret 2023 .

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 bulan atau data minimal

100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

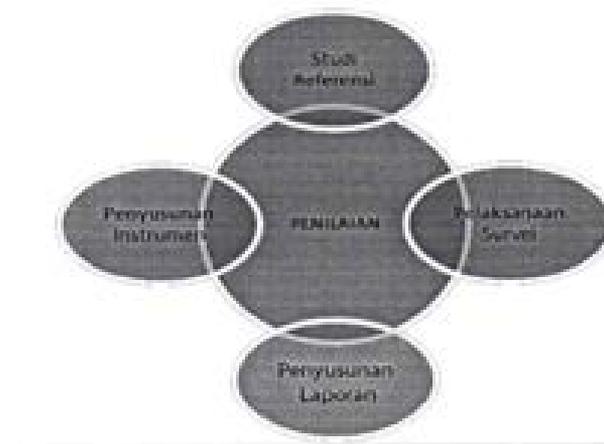
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

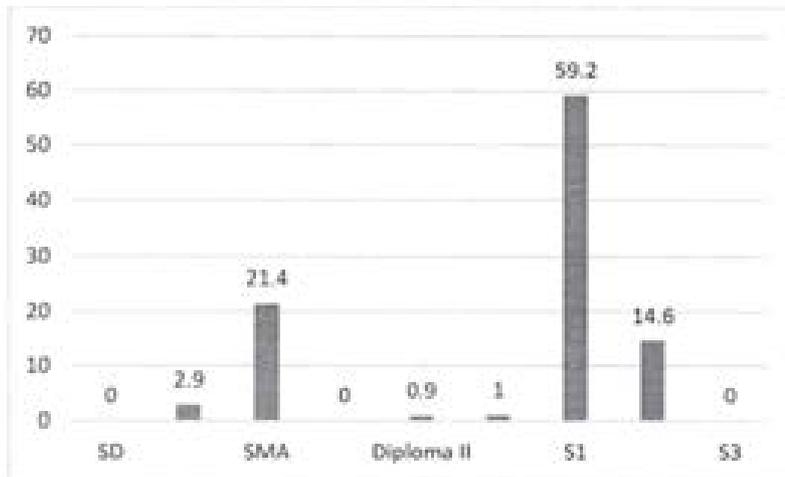
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar tingkat S1 sebesar 59.2%.

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden
Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	0	0.0	0.0	0.0
	SMP	3	2.9	2.9	2.9
	SMA	22	21.4	21.4	24.3
	Diploma I	0	0.0	0.0	24.3
	Diploma II	1	0.9	0.9	25.2
	Diploma III	1	1.0	1.0	26.2
	S1	61	59.2	59.2	85.4
	S2	15	14.6	14.6	100.0
	S3	0	0.0	0.0	100.0
	Total	103	100	100	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden

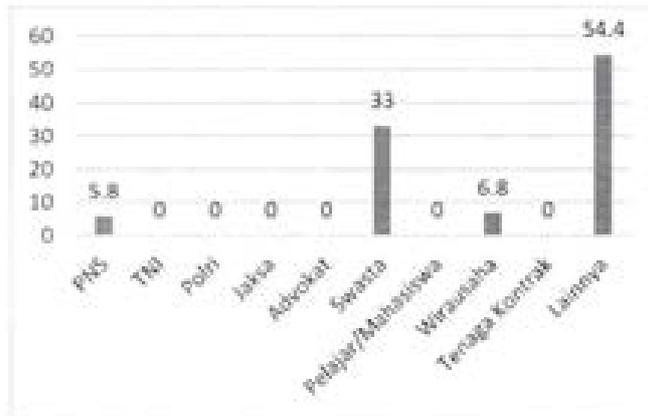
3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 54.4 % responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai Lainnya.

Tabel 5.
Jenis Pekerjaan Responden
Pekerjaan Utama

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	6	5.8	5.8	5.8
	TNI	0	0.0	0.0	5.8
	Polri	0	0.0	0.0	5.8
	Jaksa	0	0.0	0.0	5.8
	Advokat	0	0.0	0.0	5.8
	Swasta	34	33.0	33.0	38.8
	Pelajar/Mahasiswa	0	0.0	0.0	38.8
	Wirausaha	7	6.8	6.8	45.6
	Tenaga kontrak	0	0.0	0.0	45.6
	Lainnya	56	54.4	54.4	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden

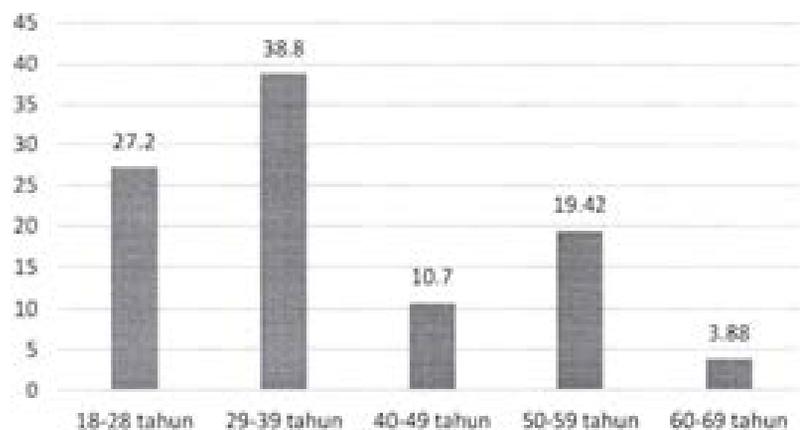
3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia 29 s/d 39 tahun sebesar 38.8%.

Tabel 6.
Usia Responden
Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18-28 tahun	28	27.2	27.2	27.2
	29-39 tahun	40	38.8	38.8	66.0
	40-49 tahun	11	10.7	10.7	76.7
	50-59 tahun	20	19.42	19.42	96.12
	60-69 tahun	4	3.88	3.88	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 3. Usia responden

3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

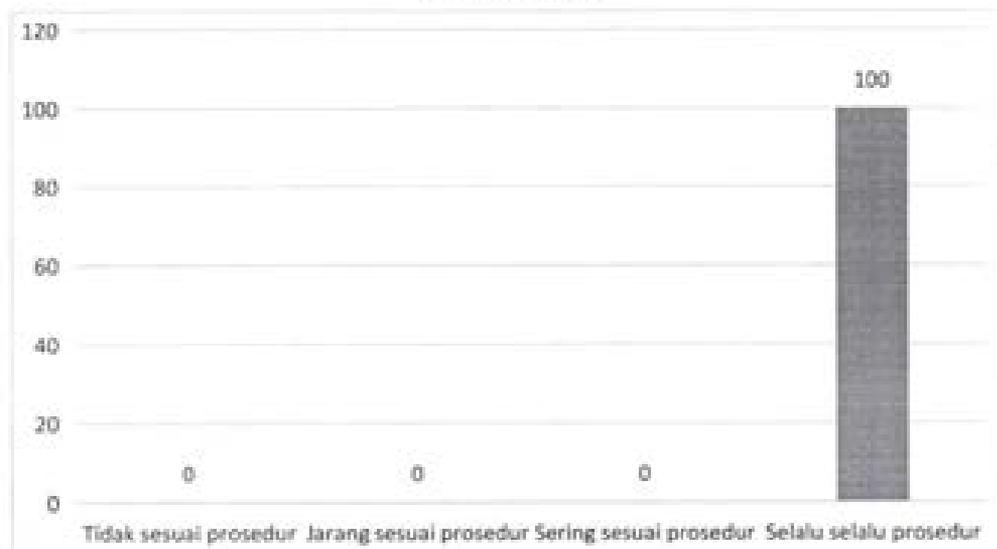
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4.000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

Tabel 7.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan
Manipulasi Peraturan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak sesuai prosedur	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang sesuai prosedur	0	0.0	0.0	0.0
	Sering sesuai prosedur	0	0.0	0.0	0.0
	Selalu selalu prosedur	103	100	100	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :

Grafik 4. Manipulasi Peraturan



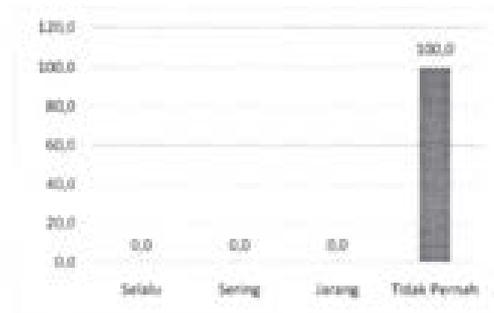
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4.000 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

**Tabel 8.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	0	0.0	0.0	0.0
	Tidak Ada	103	100	100	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 5. Penyalahgunaan Jabatan

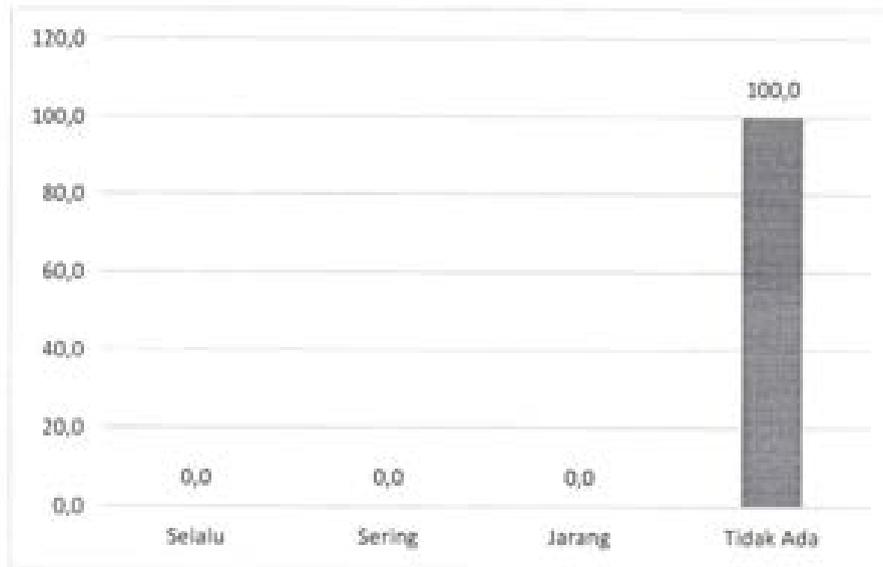
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4.000, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

Tabel 9.
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh
Menjual Pengaruh

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	0	0.0	0.0	0.0
	Tidak Ada	103	100	100	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 6. Menjual Pengaruh

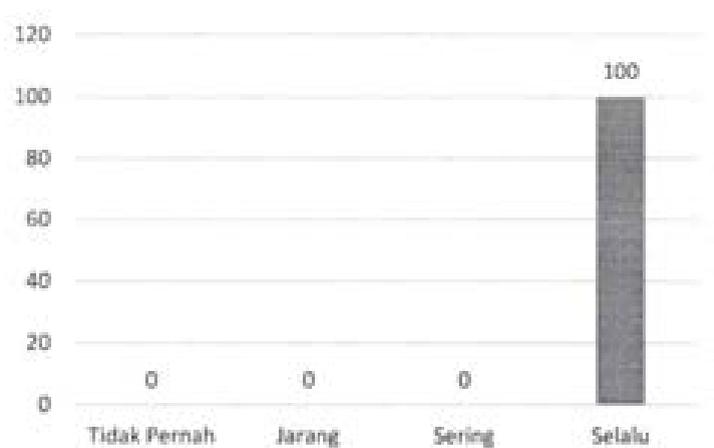
3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4.000, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

Tabel 10.
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya
Transparansi Biaya

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Selalu	103	100	100	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 7. Transparansi Biaya

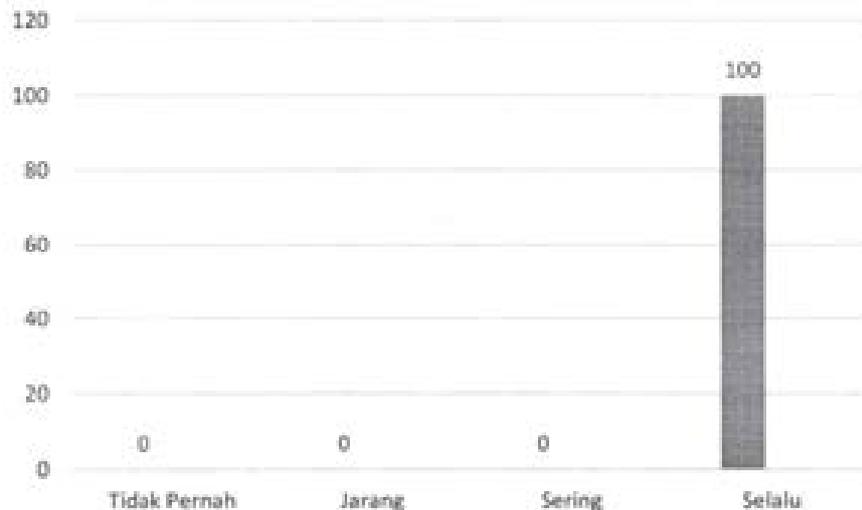
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4.000 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

Tabel 11.
Indeks pada Indikator Tambahan Biaya
Biaya Tambahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Selalu	103	100	100	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 9. Tambahan Biaya

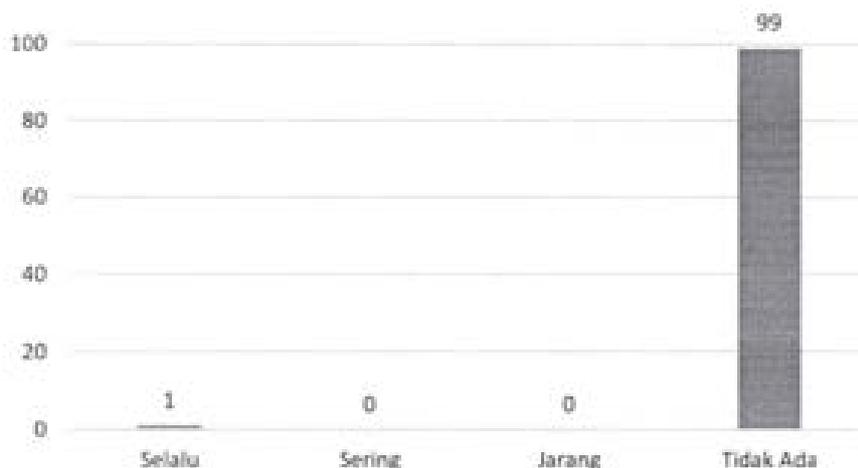
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3.971 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

Tabel 12.
Indeks pada Indikator Hadiah
Hadiah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	1	1.0	1.0	1.0
	Sering	0	0.0	0.0	1.0
	Jarang	0	0.0	0.0	1.0
	Tidak Ada	102	99.0	99.0	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 10. Hadiah

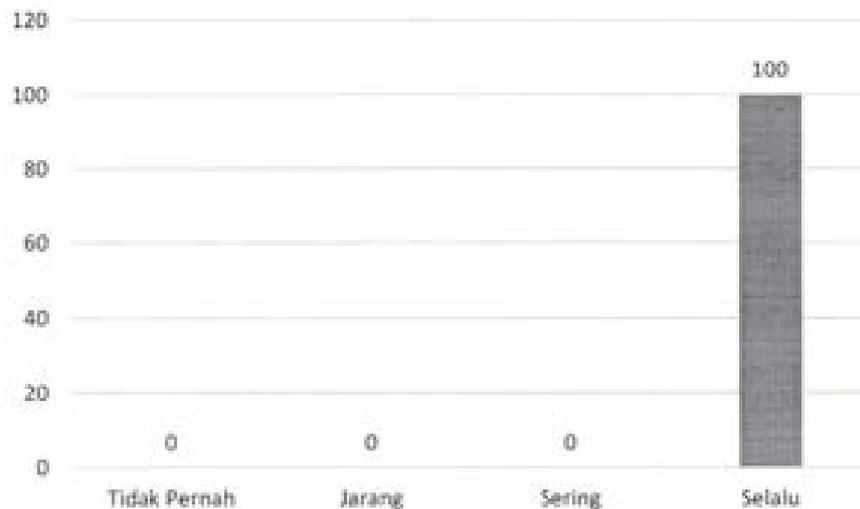
3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4.000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

Tabel 13.
Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran
Transaparansi Pembayaran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Selalu	103	100	100	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 11. Transparansi Pembayaran

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3.990. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

**Tabel 14.
Indeks pada Indikator Percaloan
Percaloan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Ada	102	99.0	99.0	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 12. Percaloan

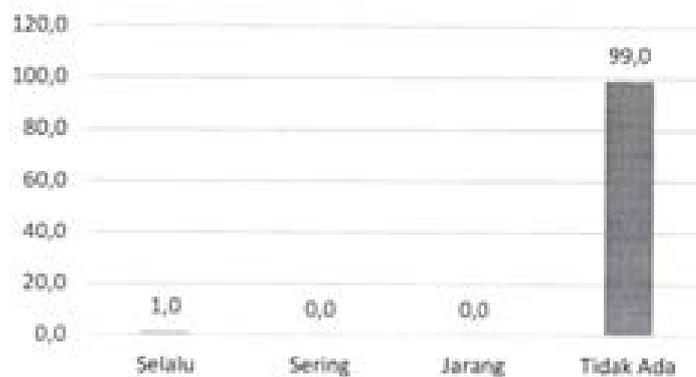
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3.971. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

Tabel 15.
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang
Perbuatan Curang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	1	1.0	1.0	1.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	0	0.0	0.0	0.0
	Tidak Ada	102	99.0	99.0	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 13. Perbuatan Curang

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3.990. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

Tabel 16.
Tabel Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia
Transaksi Rahasia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Ada	102	99.0	99.0	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 8. Transaksi Rahasia

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Denpasar sebesar 3.992

Tabel 17.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Denpasar

No	Ruang lingkup	Nilai Rata-rata
1	Manipulasi Peraturan	4.000
2	Penyalahgunaan Jabatan	4.000
3	Menjual Pengaruh	4.000
4	Transparansi Biaya	4.000
5	Biaya Tambahan	4.000
6	Hadiah	3.971
7	Transparansi Pembayaran	4.000
8	Percaloan	3.990
9	Perbuatan Curang	3.971
10	Transaksi Rahasia	3.990

Indeks 3.992 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka

Tabel 18.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan
Negeri Denpasar

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Denpasar diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Denpasar memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,992/99.81%. atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4.000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.000
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4.000
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4.000
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3.971
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4.000
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3.990
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3.971
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3.990

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Denpasar pada Triwulan I Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki indeks di atas 3,992/99.81% atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya, disusul dengan indikator perbuatan curang dan percaloan. Oleh karenanya peningkatan pelayanan dengan inovasi-inovasi terbaru lainnya diperlukan untuk itu.

51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
Jumlah	412	412	412	412	412	409	412	411	409	411	
NRR per RL	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.971	4.000	3.990	3.971	3.990	
NRR Tertimbang	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.397	0.400	0.399	0.397	0.399	3.992 *)

Keterangan :

- RL = Ruang Lingkup Pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per RL = Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per ruang lingkup x 0.111

IPK UNIT PELAYANAN : 99.81

Kategori: BERSIH DARI KORUPSI

Mutu :

- 1 (Tidak bersih dari korupsi) : 1,00 - 1,75 : 25 - 43,75
- 2 (Kurang bersih dari korupsi) : 1,76 - 2,50 : 43,76 - 62,50
- 3 (Cukup bersih dari korupsi) : 2,51 - 3,25 : 62,51 - 81,25
- 4 (Bersih dari korupsi) : 3,26 - 4,00 : 81,26 - 100,00

Tabel

RINGKASAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Indeks Persepsi Korupsi:

99.81

Kategori: BERSIH DARI KORUPSI

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	4.000	Sangat Baik	1
2	Penyalahgunaan Jabatan	4.000	Sangat Baik	1
3	Menjual Pengaruh	4.000	Sangat Baik	1
4	Transparansi Biaya	4.000	Sangat Baik	1
5	Biaya Tambahan	4.000	Sangat Baik	1
6	Hadiah	3.971	Sangat Baik	9
7	Transparansi Pembayaran	4.000	Sangat Baik	1
8	Percaloan	3.990	Sangat Baik	7
9	Perbuatan Curang	3.971	Sangat Baik	9
10	Transaksi Rahasia	3.990	Sangat Baik	7

Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi

